

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pilar utama demokrasi yaitu kebebasan berekspresi terutama dalam berkomunikasi. Masyarakat dapat terlibat dalam proses perkembangan berbagai isu dan permasalahan sosial, terutama mengenai politik. Salah satu wadah untuk menjalin komunikasi dengan mudah yaitu melalui media massa. Tak hanya untuk berkomunikasi saja, media massa juga dapat menyampaikan informasi dengan sangat cepat dalam hitungan detik. Tak heran jika masyarakat dapat memakan waktu lama dalam menggunakan media massa.

Media massa dianggap sebagai kekuatan politik karena dapat membentuk opini masyarakat. Politik memiliki hubungan yang erat dengan media, karena media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat secara signifikan melalui efek persuasif terkait isu-isu politik, terutama yang muncul di media massa. Bentuk media massa yang banyak dimanfaatkan adalah media sosial.

Media sosial merupakan bentuk media massa yang berbentuk platform digital, yang memudahkan penggunaannya dalam mengakses informasi. Selain sebagai sarana untuk mendapatkan informasi, media sosial juga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan terhubung satu sama lain secara virtual. Salah satu aplikasi media sosial yang saat ini populer, terutama di kalangan generasi muda adalah Instagram.

Instagram sebagai platform digital mempunyai fitur-fitur yang digemari oleh pengguna terutama oleh generasi muda. Generasi muda cenderung tak bisa jauh dari penggunaan media sosial, seperti sudah menjadi kebiasaan baru yang melekat. Sehingga, permasalahan dan isu yang sedang ramai dan berkembang di masyarakat tak luput dari jangkauan mereka, terutama isu politik yang sudah menjadi “makanan sehari-hari”.

Teori Uses and Gratification yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1974 oleh Michael Gurevitch, Elihu Katz, dan Jay G. Blumer percaya bahwa konsumen dapat berpartisipasi secara aktif dan memegang kendali media terhadap

media yang mereka gunakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Konsumen dapat mengakses atau tidak, menyaksikan atau tidak maupun menerima atau tidak segala bentuk informasi dari suatu media sesuai dengan keinginan mereka.

Isu mengenai situasi pemerintahan Indonesia yang mengalami kegentingan tersebar ke seluruh media sosial, termasuk Instagram. Isu tersebut menjadi perbincangan hangat karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diduga berusaha "menghalangi" keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pencalonan kepala daerah.

Pada Selasa, 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan dua keputusan, yaitu membatalkan batas usia untuk calon kepala daerah dan mengabulkan gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora dengan menurunkan ambang batas kursi di parlemen dari 20% menjadi 6,5% hingga 10% berdasarkan jumlah penduduk di daerah tersebut, atau 25% dari perolehan suara sah pada pemilihan legislatif sebelumnya.

Kaesang tidak bisa mencalonkan diri dalam Pilkada karena adanya batasan usia, sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan partai kecil lainnya yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapatkan kesempatan untuk mengajukan calon kepala daerah.

Esoknya, Rabu 21 Agustus 2024, keputusan tersebut langsung direspon oleh DPR dengan melakukan rapat baleg (Badan Legislatif) dan membuat perubahan rencana dengan merevisi RUU Pilkada hanya dalam kurun waktu satu hari, hingga mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Hasil RUU Pilkada tersebut memutuskan untuk mengubah ketentuan umur calon kepala daerah tingkat provinsi menjadi genap 30 tahun saat KPU telah menetapkan calon sebagai kandidat resmi. Hal tersebut tentunya memberikan peluang bagi Kaesang untuk maju ke Pilkada. Situasi ini menimbulkan polemik di masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan aturan penetapan ambang batas pencalonan kepala daerah.

Pada 22 Agustus 2024 lalu, akun instagram @najwashihab membagikan video singkat di akun Instagram pribadinya berkolaborasi dengan @narasi.tv dan @matanajwa, membuat gempar hampir seluruh penduduk Indonesia. Video singkat tersebut berisi pesan "Peringatan Darurat" dengan simbol "Garuda Biru"

yang menjelaskan situasi genting saat ini mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga memicu ketegangan di media sosial terutama di Instagram.

Video singkat tersebut telah dibagikan sebanyak 500.000 kali di Instagram dengan volume pencarian lebih dari 200.000. Video berdurasi 3,03 menit ini menyampaikan ajakan kepada masyarakat untuk menyebarkan pesan "Peringatan Darurat" sebagai pengingat akan pentingnya kondisi pemerintahan Indonesia saat ini. Pengguna Instagram terutama generasi muda ikut serta menyebarkan pesan "Peringatan Darurat" melalui Instagram story dan postingan dengan tagar #kawalputusanmk yang telah dibagikan lebih dari 5.000 postingan.

Bentuk protes terhadap pemerintah diekspresikan melalui demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR pada hari Kamis, 22 Agustus 2024. Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia, partai Buruh, aktor, komika hingga seniman seperti Joko Anwar terpantau mengikuti aksi demo tersebut. Mereka menyuarakan aspirasi mereka dengan lantang untuk membuktikan bahwa masyarakat Indonesia tidak terima dengan keputusan DPR mengenai revisi RUU Pilkada yang dianggap sangat tidak adil dan merubah sistem pemerintahan yang berlaku.

Gerakan massa ini merupakan efek dari akibat terpaan media dari konten gerakan peringatan darurat yang diunggah oleh akun Instagram @matanajwa yang meliputi frekuensi, durasi dan atensi publik dalam menonton dan mengakses akun tersebut. Sehingga setelah publik tenggelam dalam konten tersebut, muncul pandangan dan reaksi yang berbeda mengenai konten gerakan peringatan darurat terutama pendapat mereka terhadap pemerintah mengenai kepercayaan politik.

Generasi Z yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, telah menjadi mayoritas penduduk Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh CSIS dan demografi Pemilu 2024, tercatat lebih dari 50% pemilih berasal dari generasi muda. Menurut data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis hasil sensus penduduk 2020, jumlah Generasi Z mencapai sekitar 74,93 juta orang atau 27,94% dari total populasi Indonesia. Tentunya generasi ini akan berpartisipasi dalam Pemilu dan kegiatan politik lainnya.

Antusiasme generasi muda dalam Pemilu 2024 cukup tinggi. Menurut

lembaga survei Aksara Research and Consulting yang mengeluarkan hasil survei terbaru, sebanyak 70,7 persen responden dari generasi muda menyatakan akan menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu 2024 yang akan datang.

Meskipun tingginya rasa antusiasme generasi muda, tak dapat dipungkiri bahwa ada rasa apatisme dan skeptisisme terhadap pemerintah. Hal ini disebabkan oleh penyebaran informasi di media sosial, yang merupakan platform utama bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik. Sekitar 40% dari konten politik yang ada mengandung informasi yang belum terverifikasi kebenarannya (Laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2023).

Jumlah mahasiswa di UNAS cukup besar, terutama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) pada Program Studi Ilmu Komunikasi. Sebagai mahasiswa dari Program Studi Ilmu Komunikasi, mereka tentunya memiliki kepekaan terhadap isu-isu politik, terutama dalam situasi kritis yang sedang dihadapi Indonesia saat ini.

Perbincangan mengenai gerakan “Peringatan Darurat” seperti tak ada habisnya di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Hal ini membuktikan bahwa isu politik menjadi topik hangat yang tak lepas dari mahasiswa.

Masa depan bangsa Indonesia kini bergantung pada generasi muda. Rendahnya tingkat kepercayaan politik generasi muda kepada pemerintah menyebabkan dampak signifikan yang tak dapat dihindari seperti rasa apatisme, kurangnya partisipasi dalam kegiatan politik, kurangnya penerimaan hak terhadap pemimpin dan dampak negatif lainnya.

Penelitian ini mengangkat isu politik gerakan “Peringatan Darurat” sebagai isu terbaru yang menjadi perhatian publik. Peneliti tertarik untuk membahas isu tersebut karena efek persuasi yang timbul terhadap publik cukup besar terutama generasi muda pengguna platform media sosial Instagram.

Penulis mengambil sampel mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021 Universitas Nasional guna menggali data dan informasi mengenai pendapat dan pandangan mereka mengenai konten gerakan “Peringatan Darurat”. Judul dari penelitian ini yaitu : **“Pengaruh Terpaan Konten Gerakan Peringatan Darurat di Akun Instagram @matanajwa Terhadap Tingkat Kepercayaan Politik**

(Survei Pada Mahasiswa Angkatan 2021 Ilmu Komunikasi Universitas Nasional)”

1.2. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh terpaan konten gerakan peringatan darurat di Instagram terhadap tingkat kepercayaan politik mahasiswa angkatan 2021 Ilmu Komunikasi Universitas Nasional?

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, pembahasan tentang "Gerakan Peringatan Darurat" dapat memengaruhi tingkat kepercayaan politik mahasiswa secara signifikan. Oleh karena itu, peneliti membatasi fokus penelitian pada beberapa aspek, yaitu paparan konten, gerakan Peringatan Darurat, Instagram, dan tingkat kepercayaan politik di kalangan mahasiswa angkatan 2021 Ilmu Komunikasi Universitas Nasional.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengukur besar pengaruh terpaan konten peringatan darurat di Instagram terhadap tingkat kepercayaan politik mahasiswa angkatan 2021 Ilmu Komunikasi Universitas Nasional

1.5. Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini, baik dari segi teoritis maupun praktis.

1.5.1. Manfaat Teoritis

Selain mendorong individu untuk lebih sadar dan peka terhadap masalah politik yang muncul dan dampak yang dihasilkan dari kegiatan mereka yang tidak puas dengan pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan memperdalam pengetahuan.

2.5.1. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

1. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan menjadi pedoman bagi para peneliti dalam memantau perkembangan tingkat kepercayaan politik di kalangan mahasiswa.
2. Menjadi wadah dalam menuangkan ilmu dan teori oleh peneliti yang telah didapatkan dalam beberapa buku, jurnal dan internet.

b. Bagi pemerintah

1. Pemerintah diharapkan dapat memperhatikan, mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi dan gerakan masyarakat mengenai isu politik yang berkembang.

c. Bagi masyarakat

1. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran penuh dalam memilih dan memilah informasi.
2. Menjadi tolak ukur dalam membandingkan tingkat kepercayaan politik melalui tayangan media sosial
3. Masyarakat terutama generasi muda diharapkan untuk dapat lebih peka terhadap isu politik

d. Bagi media

1. Media massa diharapkan dapat mengelola pemberitaan secara cermat.
2. Penyebaran dan penyanangan informasi terutama isu politik diharapkan tidak memprovokasi maupun condong pada salah satu pihak.
3. Media massa memperhatikan dampak dari penyebaran informasi terhadap publik.